

Pembiayaan Defisit APBN menurut Umer Chapra (Studi Analisis Kritik terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015)

English Title: State Budget Deficit Financing according to Umer Chapra (Critical Analysis Study of Deficit Financing of The Indonesian State Budget for 2010-2015 Period)

Royyan Ramdhani Djayusman, Fatturroyhan

ABSTRACT

The Indonesian State Budget uses the concept of a deficit as a stimulus for economic growth. This deficit is financed by loans, both internally and externally, which contain elements of usury that will eventually lead to inflation and sometimes even lead to recession and economic depression. Meanwhile, conditions that should be deficit are financed in a way that does not contain usury and maintains economic stability. This study aims to determine the deficit financing of the Indonesian State Budget for 2010-2015 and to conduct a critical analysis of the deficit financing of the Indonesian State Budget for 2010-2015 in terms of Umer Chapra's thinking. This study uses a type of literature research, with the method of critical analysis. This research shows that the deficit financing of the Indonesian State Budget in 2010-2015, budget deficit financing comes from two sources, namely debt financing consisting of domestic loans and foreign loans, and non-debt financing consisting of tax revenues, management or privatization of BUMN, and asset management results. From the analysis of criticism of Indonesia's deficit financing, the researcher criticizes 3 elements, namely revenue, financing, and expenditure of the State Budget. The main problem is that the financing of the APBN deficit uses foreign debt instruments that contain elements of usury and weakens the capacity of the subsequent APBN, while there is another alternative, namely the state Sukuk to cover the APBN deficit. In other words, that the foreign debt carried out by the government weakens the APBN itself with its principal debt burden and interest installments. From the non-debt side, the revenue from tax collection that occurs is unfair, and the privatization of BUMNs that occurs is detrimental to the state. Meanwhile, in terms of APBN expenditures for financing have not prioritized public welfare, it can be seen from the 2010-2015 APBN expenditure budget post that has swelled in the military defense budget post.

Keywords: APBN, Indonesian state budget, state budget deficit, deficit financing

ABSTRAK

APBN Indonesia menggunakan konsep defisit sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Defisit tersebut didanai dengan pinjaman, baik internal maupun eksternal yang mengandung unsur riba yang akhirnya akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan terkadang malah menjurus ke resesi dan depresi ekonomi. Sedangkan, keadaan yang



JIHBIZ
Jurnal Ekonomi,
Keuangan dan
Perbankan Syariah
P-ISSN 1238-1235

Vol. 1 No. 2 2017
Page 125-136

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat Malang,
Indonesia

Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v1i2.713>



Author(s):

Royyan Ramdhani Djayusman
Universitas Darussalam Gontor, Siman,
Ponorogo, Indonesia
Email: royyan@unida.gontor.ac.id

Fatturroyhan
Universitas Darussalam Gontor, Siman,
Ponorogo, Indonesia
Email: fatturekis27@gmail.com

Correspondence:

royyan@unida.gontor.ac.id

Article Type:

Conceptual Paper

seharusnya defisit dibiayai dengan cara yang tidak mengandung riba dan menjaga kestabilan ekonomi. Menurut data yang ada pada tahun 2010-2015 memperlihatkan defisit yang meningkat diikuti pembiayaan defisit yang meningkat pula. Umer Chapra ia tidak hanya membahas aspek teoritis saja, melainkan juga aspek aplikasi sehingga gagasan-gagasannya dalam bidang ekonomi Islam cukup realistis untuk diaplikasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan defisit APBN Indonesia tahun 2010-2015 dan untuk melakukan analisis kritik terhadap pembiayaan defisit APBN Indonesia tahun 2010-2015 ditinjau dari pemikiran Umer Chapra. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur, dengan metode analisis kritik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan defisit APBN Indonesia pada tahun 2010-2015 pembiayaan defisit anggaran berasal dari dua sumber, yaitu pembiayaan utang yang terdiri pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri, dan pembiayaan non-utang yang terdiri dari pendapatan pajak, manajemen atau privatisasi BUMN, dan hasil pengelolaan aset. Dari analisis kritik terhadap pembiayaan Defisit Indonesia peneliti melakukan kritik dari 3 unsur yaitu penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran APBN. Masalah utama adalah pembiayaan defisit APBN menggunakan instrumen utang luar negeri yang mengandung unsur riba dan melemahkan kemampuan APBN selanjutnya, sedangkan ada alternatif lain yaitu sukuk negara untuk menutup defisit APBN tersebut. Dengan kata lain, bahwasanya utang luar negeri yang dilakukan pemerintah malah melemahkan APBN itu sendiri dengan beban pokok utang dan cicilan bunganya. Dari sisi non utang penerimaan pemungutan pajak yang terjadi tidak adil, dan privatisasi BUMN yang terjadi merugikan negara. Sedangkan dari sisi pengeluaran APBN untuk pembiayaan belum memprioritaskan kesejahteraan masyarakat terlihat dari pos anggaran pengeluaran APBN tahun 2010-2015 membengkak pada pos anggaran pertahanan militer.

Kata Kunci: APBN, defisit APBN, pembiayaan defisit

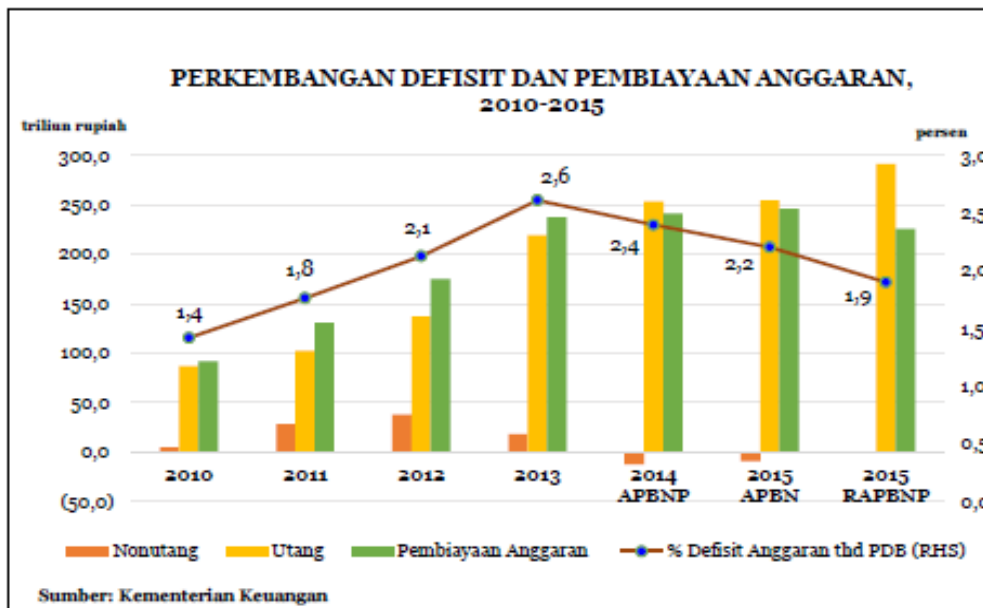
1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Setiap tahunnya sistem APBN Indonesia disusun dengan konsep anggaran defisit (Kusumaningrum, 2014). Konsekuensi dari penerapan kebijakan fiskal ekspansif adalah meningkatnya pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah yang tidak diikuti meningkatnya sumber pajak sebagai sumber utama keuangan pemerintah akan mengakibatkan defisit anggaran (Anderson, 2015). Defisit tersebut didanai dengan pinjaman, baik internal maupun eksternal, mencetak uang dan sebagainya, yang akhirnya akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan terkadang malah menjurus ke resesi dan depresi ekonomi (Chaudhry, 2016)

Perkembangan defisit APBN dari tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan, yang juga tentu meningkatkan pembiayaan defisit anggaran. Tetapi apabila dibandingkan dengan realisasinya, dalam periode tersebut, realisasi defisit anggaran dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan target APBN-P yang ditetapkan sebelumnya. Dan pada RAPBN-P tahun 2015, target defisit APBN ditetapkan lebih rendah dari target defisit APBN pada APBN tahun 2015 (Anderson, 2015).



Gambar 1 Perkembangan Defisit APBN 2010-2015

Sumber: Kementerian Keuangan

Pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan utang luar negeri dilatarbelakangi oleh trauma inflasi yang tinggi pada tahun 1960-an, yang disebabkan oleh pembiayaan defisit anggaran dengan pencetakan uang. Defisit dalam negeri (dalam rupiah) akan didanai oleh utang luar negeri (dalam mata uang asing) (Waluyo, 2006). Utang menjadi tulang punggung pembiayaan defisit anggaran pemerintah. Dalam periode 2010-2014, sumber utama pembiayaan anggaran berasal dari utang yang sebagian besar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Kebijakan pemerintah dalam mengandalkan sumber pembiayaan utang dalam negeri dilakukan untuk menghindari adanya *negative net flow* dari pembiayaan utang luar negeri (Anderson, 2015).

Umer Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, dia adalah ekonom yang aktif melakukan penelitian kajian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. (Chapra, 1992). Chapra juga seorang penasihat ekonomi senior pada *monetary agency*, kerajaan Arab Saudi, sejak tahun 1965 (Chamid, 2010, p. 359). Chapra dengan pengalamannya yang luas dalam pengajaran dan riset dibidang ekonomi serta pemahamannya yang bagus tentang syariat Islam, mengajukan bahwa Islamlah sebagai sistem alternatif paling tepat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ia tidak hanya membahas aspek teoritis saja, melainkan juga aspek aplikasi sehingga gagasan-gagasannya dalam bidang ekonomi Islam cukup realistis untuk dioperasionalkan dalam kehidupan nyata (Chamid, 2010, p. 361). Salah satu tujuan konsep Chapra adalah merancang kerangka sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersandar kepada Al-Quran dan *Sunnah* (Chamid, 2010, p. 362). Chapra banyak membahas dalam konsep pembiayaan defisit anggaran.

Keadaan yang seharusnya adalah sesuai dengan perspektif pemikiran Umer Chapra yang mana defisit dibiayai dengan cara-cara yang jauh dari *riba* dan cara-cara yang melanggar syariat Islam. Para *Fuqaha* menekankan akan terealisasinya akan stabilitas ekonomi, sasaran ini tentu saja membatasi kemampuan negara untuk menggunakan pembiayaan yang menimbulkan inflasi. Karena itu defisit harus direduksi sampai pada titik di mana dapat dibiayai dengan cara yang tidak menimbulkan inflasi dan tanpa melambatkan investasi secara signifikan (Chapra, 200:290). Peningkatan pembiayaan defisit anggaran melalui hutang luar negeri, akan mengakibatkan terjadinya kenaikan tingkat inflasi, yang selanjutnya melalui kenaikan tingkat inflasi tersebut mengakibatkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan (Soebagiyo, 2012, p. 268) Permasalahannya adalah apakah hutang luar negeri merupakan cara terbaik dalam rangka menutup defisit APBN mengingat setiap tahunnya peminjamannya tersebut memberatkan kinerja APBN (Aziz, 2015, p. 1).

Dari penjelasan tersebut perlu adanya penelitian analisis kritik terhadap praktik pembiayaan defisit anggaran APBN menurut Umer Chapra guna terwujudnya kestabilan ekonomi. Maka penulis akan memfokuskan penelitian tentang topik tersebut. Adapun judul penelitian yang penulis angkat adalah **“Pembiayaan Defisit Anggaran APBN menurut Umer Chapra (Analisis Kritik Pembiayaan Defisit APBN Indonesia 2010- 2015)”**.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur dengan pendekatan teoritis, dengan studi analisis kritik, dengan mengumpulkan data-data primer dari buku-buku karangan Umer Chapra dan data-data yang diambil dari situs Kementerian Keuangan, BPK dan Badan Pusat Statistik selama periode 2010-2015 dengan menggunakan metode dokumentasi. Data sekunder adalah data-data yang diambil dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif untuk menemukan konsep pembiayaan defisit APBN Indonesia tahun 2010-2015 secara umum. Kemudian, dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif, agar analisisnya mendalam peneliti melanjutkan analisisnya dengan analisis kritik sebagai kritikan terhadap pembiayaan defisit APBN Indonesia tahun 2010-2015 menggunakan pemikiran Umer Chapra dalam konsep pembiayaan defisit APBN.

3. Hasil dan Pembahasan

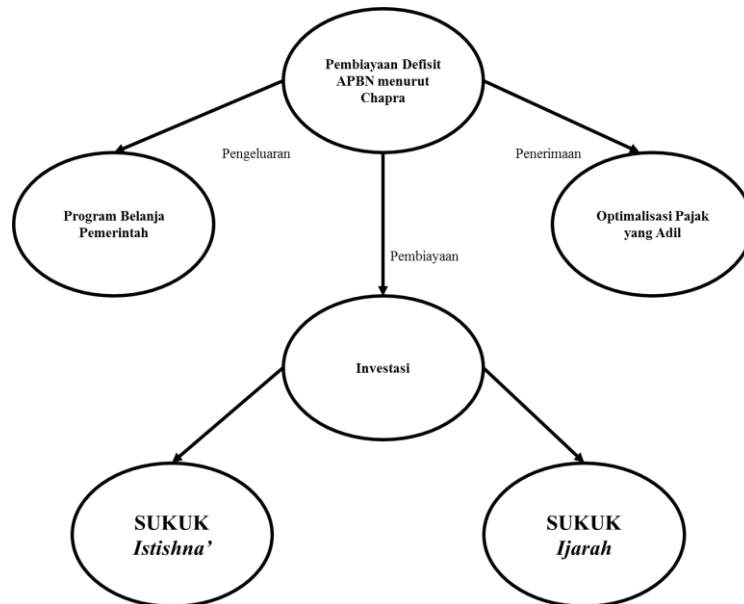
3.1 Biografi Umer Chapra

Umer Chapra, atau biasa dipanggil Chapra, dikenal sebagai pelopor dan penggagas ekonomi Islam kontemporer (Suadi, 2012). Umer Chapra adalah seorang pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan. Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Umer Chapra adalah sedikit dari banyak akademisi dan peneliti ekonomi Islam yang selain memiliki pengalaman yang luas di bidang pengajaran dan riset di bidang ekonomi, juga memiliki pemahaman yang komprehensif tentang syariat Islam. Gagasannya tidak hanya berputar-putar pada tataran teoritis yang mengawang, tapi juga sangat *visiable* untuk diterapkan. Khususnya pada sistem ekonomi dan keuangan modern yang erat kaitannya dengan konsep uang, perbankan dan kebijakan moneter. Di tangan Umer Chapra, ekonomi Islam tidak terlihat sebagai gagasan utopia. Bahkan sebaliknya, membumi dan operasional untuk diterapkan. Tidak mengherankan

bila Umer Chapra menerima banyak penghargaan dari berbagai pihak atas jasanya mengembangkan ekonomi Islam.

3.2 Kerangka Teori

Untuk melakukan analisis kritik terhadap pembiayaan defisit APBN Indonesia periode 2010-2015 maka peneliti menggunakan teori perspektif Umer Chapra seperti tergambar dalam skema di bawah ini:



Gambar 2 Kerangka Teori Pembiayaan Defisit APBN menurut Umer Chapra

Sumber: Teori Umer Chapra

Suatu sistem pajak dipandang adil apabila memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, pajak dipungut untuk membiayai apa yang dipandang mutlak diperlukan untuk mewujudkan *maqashid*; *kedua*, beban tidak boleh sama sehubungan dengan kemampuan orang untuk memikulnya, dan *ketiga*, dana pajak yang terkumpul harus dipergunakan setulusnya untuk tujuan pengumpulannya. Suatu sistem pajak yang tidak memenuhi tiga kriteria ini dipandang sebagai *opresif* dan karena itu dilarang (Mawardi, 2015, p. 209).

Prinsip-prinsip pengeluaran negara sudah banyak dalam tulisan klasik namun tidak ada perhatian yang memadai terhadap prinsip-prinsip belanja negara pada masa modern sekarang (Mawardi, 2015), maka enam prinsip umum berikut dapat dijabarkan untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik menurut Umer Chapra:

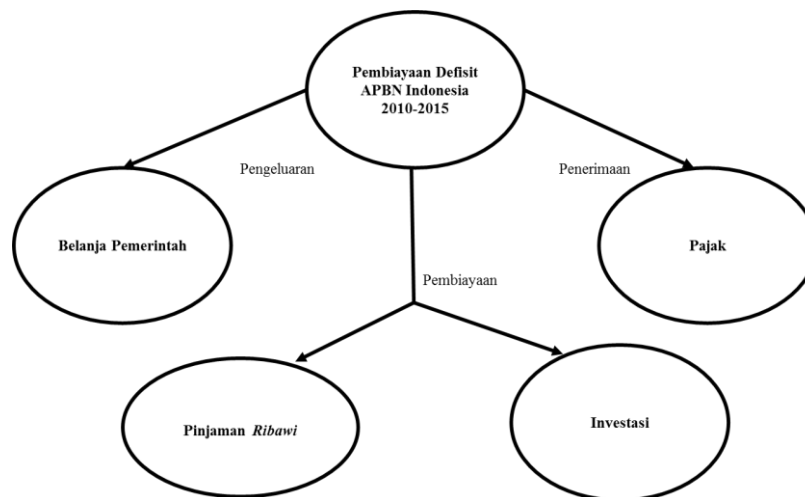
1. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya masyarakat.
2. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan rasa tenteram.
3. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus lebih diutamakan di atas kepentingan rasa tenteram.

4. Pengorbanan dan kerugian individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan dan kerugian publik, dan pengorbanan ataupun kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan menjatuhkan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5. Siapa pun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
6. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi merupakan suatu kewajiban untuk pengadaan.

Pemerintah juga dapat menggunakan cara sewa (*leasing*) untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dan diimplementasikan oleh sektor swasta atas dasar kompetisi menurut spesifikasi pemerintah. Yang dimaksud dengan *leasing* di sini adalah sukuk berbasis penyewaan. Sukuk *syari'ah* berbasis penyewaan adalah dengan kontrak *ijarah*, *ijarah muntahiyyah bittamlik*, dan *ijarah mawshufah fi dhimmah* (Isra, 2015, p. 240).

3.3 Kritik Analisis

Untuk melakukan analisis kritik maka peneliti menggunakan metode analisis kritik dari gambaran-gambaran praktik pembiayaan defisit APBN Indonesia tahun 2010-2015 ditinjau dari pemikiran Umer Chapra, sebagai berikut:



Gambar 3 Kerangka Teori Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Tahun 2010-2015

Sumber: Menteri Keuangan, BPS, BPK

Pembiayaan defisit APBN Indonesia terdiri dari penerimaan yaitu pajak, pengeluaran pemerintah dan pembiayaan defisit, maka peneliti melakukan analisis kritiknya sebagai berikut:

3.3.1 Pajak

Pelaksanaan dalam pemungutan pajak kepada masyarakat belum maksimal, sehingga pemerintah mengadakan *tax amnesty* reaksi terhadap hal tersebut (Yustiari, 2016, p. 4).

Pemungutan pajak pemerintah Indonesia tahun periode 2010-2015 belum dianggap adil dari perspektif Umer Chapra dikarenakan Para penulis menunjukkan kewajiban pembayar pajak dalam negara Islam. Memang merupakan suatu kewajiban moral dan legal warga negara Islam untuk membayar pajak, juga merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhi dua syarat.

Pertama, penerimaan pajak harus dianggap oleh pemerintah sebagai suatu amanah dan harus dipergunakan dengan sungguh-sungguh dan efisien untuk kepentingan rakyat dan perbaikan kesejahteraan mereka. Keadaan ini tidak dapat dipenuhi kecuali ada *auditing* rekening publik, pertanggungjawaban dari pejabat pemerintah di depan parlemen dan hukuman terhadap mereka yang melanggar amanah. *Kedua*, negara harus mendistribusikan beban pajak secara adil di antara orang yang mampu membayar pajak. Syarat ini tidak dapat dipenuhi kecuali terdapat kebebasan pers untuk mengekspos perpajakan pemerintah akan kebijakan-kebijakan pengeluaran.

Supaya adil terhadap para *fuqaha* yang mendukung perpajakan, maka di sini harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. *Pertama*, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasi *maqashid*; *kedua*, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan mendistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar; dan *ketiga*, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Suatu sistem perpajakan yang tidak memenuhi tiga kriteria ini dipandang menindas dan secara aklamasi dikutuk. (Chapra 1992, p. 295). Pemungutan pajak Indonesia tahun 2010-2015 belum dianggap adil dikarenakan negara belum mendistribusikan beban pajak secara adil di antara orang yang mampu membayar pajak dikarenakan belum terdapat kebebasan pers untuk mengekspos perpajakan pemerintah akan kebijakan-kebijakan pengeluaran.

3.3.2 Pengeluaran Pemerintah

Tabel 1 Anggaran Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2010-2015 (Miliar Dolar)

Fungsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pelayanan Umum	495320	517167	590841	720060	794772	891768
Pertahanan	20968	47419	72473	81769	86307	96824
Ketertiban dan keamanan	14926	22067	30196	36487	37953	46138
Ekonomi	57359	1011414	102734	122888	128274	143526
Lingkungan Hidup	7889	11070	11451	12446	12179	10679
Perumahan dan Fasilitas Umum	20907	23425	26477	30722	31487	20466
Kesehatan	18002	13649	15564	17493	13078	21113
Pariwisata dan Budaya	1416	2901	2454	2509	2053	1926
Agama	913	1397	3562	4100	4463	5290
Pendidikan	84086	91483	103667	118467	131314	146393
Perlindungan Sosial	3457	4586	5578	7440	8063	8319
Jumlah Total	725243	836578	964997	1154381	1249943	1392442

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik 2015

Terlihat pada data di atas bahwasanya pengeluaran pemerintah pada periode 2010-2015 lebih banyak terhadap pos anggaran pertahanan militer dibanding dengan pos anggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

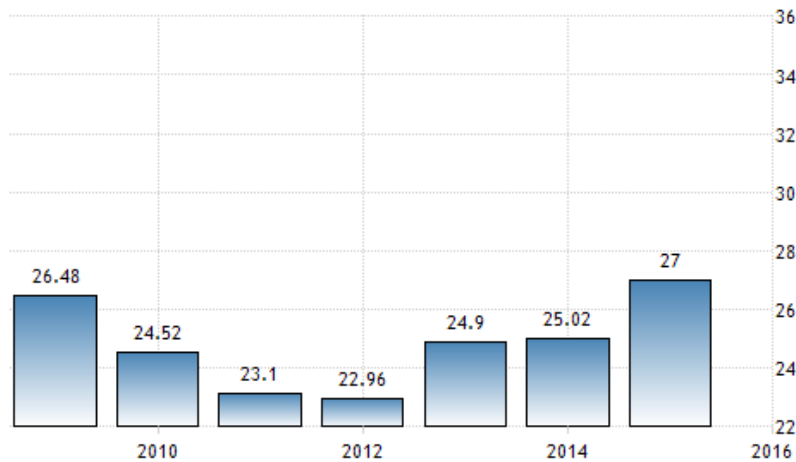
Dalam pengeluaran seharusnya negara memprioritaskan pos anggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam Tabel 1 terlihat bahwasanya pos anggaran pertahanan militer lebih besar dari pos anggaran kesehatan dan sosial. Karena, negara Indonesia faktor eksternal yang berhubungan dengan pertahanan militer tidak serius dan mengancam. Maka, dalam pos anggaran militer dapat di kurangi sampai titik yang diperlukan saja. Sehingga belanja pemerintah pada pos anggaran kesehatan dan sosial ataupun anggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan (Chapra 1992, p. 290).

Pengeluaran militer yang berlebihan merupakan penyebab lain dari tingginya defisit anggaran. Hal ini merugikan negara yang bersangkutan lewat beberapa cara. Ia meningkatkan utang sektor pemerintah, merumitkan stabilisasi dan penyesuaian, dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dalam kerangka *maqashid* dan prinsip belanja di atas, klaim pertahanan nasional untuk memiliki saham terbesar dalam pos anggaran kehilangan rasionalitasnya karena ketiadaan ancaman eksternal yang serius. Sering kali dilupakan bahwa belanja pertahanan tidak hanya memaksakan ongkos moneter, melainkan juga ongkos-ongkos lain termasuk di antaranya berkurangnya kesejahteraan kaum miskin, yang menimbulkan keresahan sosial dan ketidakstabilan politik (Chapra 1992, p. 290).

3.3.3 Pembiayaan Defisit APBN

Pemerintah negara-negara muslim berlindung di balik kebijakan konvensional berkenaan dengan peminjaman, sebagian lainnya mengabaikan prinsip kebijakan konvensional yang sama dan sudah diterima, yaitu bahwa pinjaman, bahkan untuk membiayai pengeluaran modal bukan pengeluaran jalan (Musgrave, 1959, p. 560). Pembiayaan defisit APBN Indonesia tahun 2010-2015 menggunakan utang luar negeri yang mengandung unsur bunga atau riba (Keuangan, 2015, p. 192) Bahkan unsur bunga atau riba tersebut menyebabkan kepada peningkatan jumlah pembayaran utang dan menjadikan APBN melemah pada periode selanjutnya.

Menunjukkan beban utang luar negeri terdiri dari pokok utang dan bunga. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya beban keseluruhan utang luar negeri. Sehingga, melemahkan kemampuan APBN periode selanjutnya dan memberikan beban yang besar untuk pemerintah.

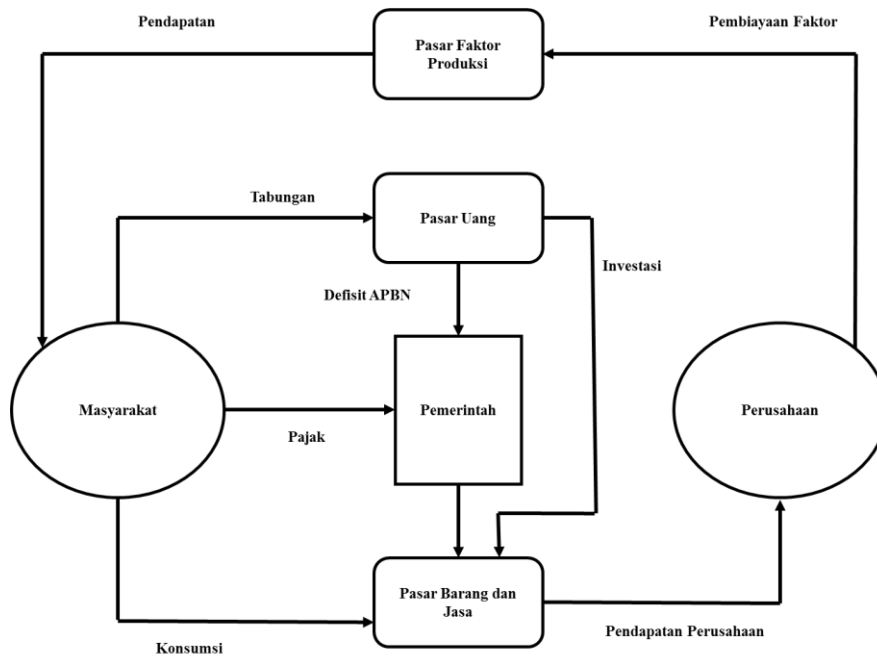


Gambar 4 Rasio Utang Luar Negeri terhadap GDP Indonesia

Sumber: Ministry of Finance of The Republic of Indonesia

Data ini menjadi data tambahan yang menunjukkan bahwa utang luar negeri meningkat setiap tahun dari tahun 2012-2015. Anehnya, Indonesia bukannya melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan program pengeluaran mereka, justru mereka mencari jalan pintas dengan mengandalkan pada ekspansi moneter dan pinjaman. Cara ini mengakibatkan kelonggaran finansial yang tidak dapat dikendalikan sehingga tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Akibatnya, inflasi relatif tinggi sementara utang domestik dan luar negeri serta beban cicilan meningkat sangat cepat. Proses ini cenderung mengekalkan dirinya, sehingga menimbulkan tingkat inflasi yang lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, defisit neraca pembayaran yang berkesinambungan, dan bahkan beban cicilan utang yang lebih berat. Hal ini lebih jauh akan menekan sumber-sumber daya bagi pembangunan, memperlambat pertumbuhan, memperparah pengangguran, dan ketegangan sosial (Chapra 1992, p. 299).

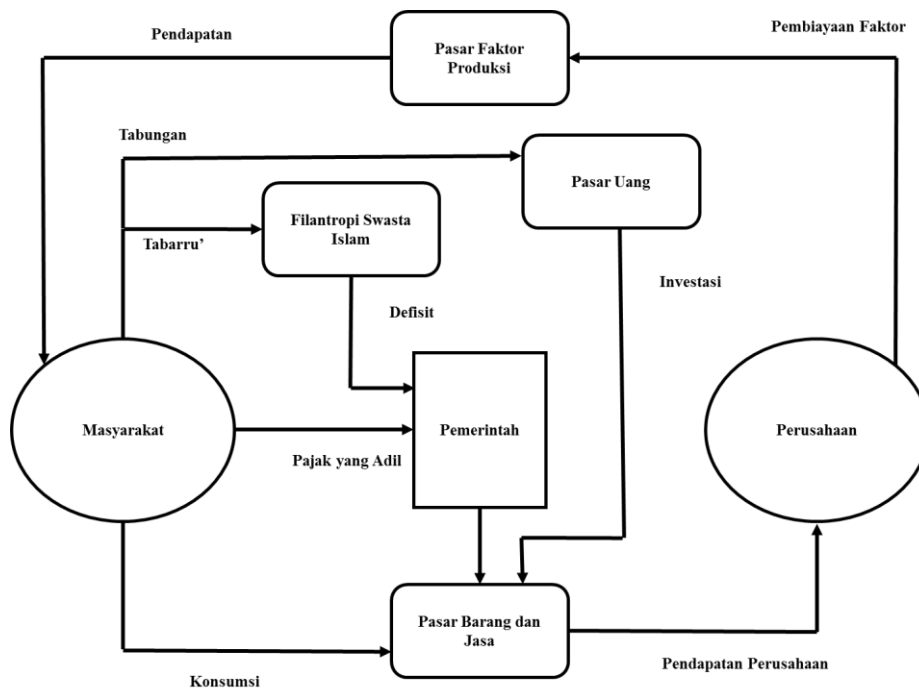
Untuk melakukan analisis kritiknya secara mendalam peneliti memanfaatkan skema pembiayaan defisit APBN Indonesia ditinjau dari pemikiran Umer Chapra dalam skema berikut:



Gambar 5 Pembiayaan Defisit APBN Indonesia

Sumber: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro

Merujuk kepada teori pemikiran Umer Chapra tentang pembiayaan defisit APBN di penjelasan sebelumnya maka peneliti menganalisis bahwasanya pembiayaan defisit APBN menurut Umer Chapra seperti gambar skema berikut:



Gambar 6 Pembiayaan Defisit APBN menurut Umer Chapra

Sumber: Pemikiran Umer Chapra dalam Pembiayaan Defisit APBN

4. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa:

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan defisit APBN Indonesia pada tahun 2010-2015 pembiayaan defisit anggaran berasal dari dua sumber, yaitu pembiayaan utang yang terdiri pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri, dan pembiayaan non-utang yang terdiri dari pendapatan pajak, manajemen atau privatisasi BUMN, dan hasil pengelolaan aset. Dari analisis kritik terhadap pembiayaan defisit APBN Indonesia tahun 2010-2015 masalah utama adalah pembiayaan defisit APBN menggunakan instrumen utang luar negeri yang mengandung unsur riba dan melemahkan kemampuan APBN selanjutnya, sedangkan ada alternatif lain yaitu sukuk negara untuk menutup defisit APBN tersebut. Dengan kata lain, bahwasanya utang luar negeri yang dilakukan pemerintah malah melemahkan APBN itu sendiri dengan beban pokok utang dan cicilan bunganya. Dari sisi non utang penerimaan pemungutan pajak yang terjadi tidak adil, dan privatisasi BUMN yang terjadi merugikan negara. Sedangkan dari sisi pengeluaran APBN untuk pembiayaan belum memprioritaskan kesejahteraan masyarakat terlihat dari pos anggaran pengeluaran APBN tahun 2010-2015 membengkak pada pos anggaran pertahanan militer. Akhirnya, konsep pembiayaan defisit APBN Umer Chapra melalui 3 unsur yaitu: penerimaan yang mana berasal dari pajak yang adil dengan ketentuan yang sesuai dengan *Maqoshid Syari'ah*, Pengeluaran yang mana dengan kesejahteraan umum sebagai prioritas utama dan pembiayaan itu sendiri dengan pembiayaan berbasis sukuk untuk menghindari utang yang mengandung riba. Dengan kata lain, konsep pembiayaan Umer Chapra lebih menekankan kepada konsep pembiayaan yang sesuai *syari'ah* sehingga dapat mencapai kepada kestabilan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Anderson, Todo Filipi, "Optimalisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Melalui Pembiayaan Non Utang sebagai Alternatif dalam Mengurangi Stok Utang Pemerintah", *Artikel Ilmiah*, 2015.
- Aziz, Abdul, "Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negri Indonesia dalam Rangka Pembiayaan Defisit APBN", dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan KEK*, Vol. 15, No. 1, 2015.
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chapra, Umer, *Islam and the Economic Challenge*, United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- _____, *The Future of Economics: An Islamic Prespective*, United Kingdom: The Islamic Foundation, 2000.
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana, 2016.
- ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kementrian Keuangan, *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015*.
- Kusumaningrum, Alfiah, "Analisis Laju Inflasi Dan Money Supply Terhadap Defisit APBN Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Akuntansi Kurikulum Khusus STAN*, 2014.
- Musgrave, Richard, *The Theory Of Public Finance*, 1959.
- Soebagiyo, Daryono, "Isu Strategi Pembiayaan Defisit Anggaran di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 13, No. 2, Desember 2012.
- Suadi, Zaki, "Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ilmu Ekonomi", *Jurnal Isrhaqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- Waluyo, Joko, "Pengaruh Pembiayaan Defisit Anggaran terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi", dalam *Jurnal Kinerja*, Volume 10, No.1, Th. 2006.
- Yustiari, Shinta Happy, "Tax Amnesty dalam Perspektif Good Governance", dalam *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 4, 2016.